



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar POM di Banjarmasin adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Akuntansi Bogor. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarmasin, 25 Juli 2023
Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin,

Drs. Leonard Duma, Apt., MM
NIP. 196312191989122001





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	44



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Banjarmasin, 25 Juli 2023
Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin,


Drs. Leonard Duma, Apt, MM.
NIP. 196510141993031001





RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester 1 TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.353.579.558,00 atau mencapai 335,36 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Semester 1 TA 2023 adalah sebesar Rp11.592.299.245,00 atau mencapai 36,01 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp32.194.714.000,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp129.187.100.206,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.531.818.579,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp126.655.281.627,00, dan Aset Lainnya Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp846.001.124,00 dan Rp128.341.099.082,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp643.538.376,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp13.234.905.100,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp12.591.366.724,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp9.921.315,00 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp12.581.445.409,00).



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp133.016.848.719,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp12.581.445.409,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.245.564.729,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp128.341.099.082,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1,000,000,000	3,353,579,558	335	578,530,623
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		1,000,000,000	3,353,579,558	335	578,530,623
BELANJA NEGARA					
Belanja Pegawai	B.2	10,240,800,000	5,026,262,343	49	4,624,454,293
Belanja Barang	B.3	14,136,703,000	5,100,738,061	36	5,276,458,589
Belanja Modal	B.4	7,817,211,000	1,465,298,841	19	648,028,030
JUMLAH BELANJA		32,194,714,000	11,592,299,245	36	-

Banjarmasin, 25 Juli 2023
Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin,

Drs. Leonard Duma, Apt, MM.
NIP. 196510141993031001



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN NERACA PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	228,900,000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	68,590,940	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	-	6,126,690,323
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	369,970	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.5	369,970	0
Persediaan	C.1.6	2,233,957,669	2,283,075,729
JUMLAH ASET LANCAR		2,531,818,579	8,409,766,052
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	32,052,868,000	32,052,868,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	62,152,793,858	60,687,185,017
Gedung dan Bangunan	C.2.3	6,578,343,000	6,578,343,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3	1,798,991,225	1,798,991,225
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	175,578,783	175,578,783
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.5	71,825,456,223	68,696,802,836
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(47,928,749,462)	(45,348,880,015)
JUMLAH ASET TETAP		126,655,281,627	124,640,888,846
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1	-	1,047,390,222
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.2	-	(1,016,688,714)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	30,701,508
JUMLAH ASET		129,187,100,206	133,081,356,406
KEWAJIBAN	C.4		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	497,280,118	64,507,687
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	119,821,006	0
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	228,900,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		846,001,124	64,507,687
JUMLAH KEWAJIBAN		846,001,124	84,084,657
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5.1	128,341,099,082	133,016,848,719
JUMLAH EKUITAS		128,341,099,082	133,016,848,719
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		129,187,100,206	133,100,933,376

Banjarmasin, 25 Juli 2023
Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin,

Drs. Leonard Duma, Apt, MM.
NIP. 196510141993031001



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKNAAN BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022
KEGIATAN OPERASIONAL		-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		643,538,376	537,384,234
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		643,538,376	537,384,234
Jumlah Pendapatan		643,538,376	537,384,234
BEBAN OPERASIONAL		-	-
Beban Pegawai	D.2	5,341,001,521	5,435,529,770
Beban Persediaan	D.3	960,558,804	933,856,985
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,285,954,902	2,403,903,514
Beban Pemeliharaan	D.5	693,020,448	1,008,316,669
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,374,809,978	1,117,999,469
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2,579,559,447	2,512,970,580
JUMLAH BEBAN		13,234,905,100	13,412,576,987
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12,591,366,724)	(12,875,192,753)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		1,200,000	(3,223,791)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1,200,000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	3,223,791
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8,721,315	41,146,389
Pendapatan dari Kegiatan Operasional Lainnya		20,341,665	41,151,389
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11,620,350	5,000
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	2,698,790,802	37,922,598
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(12,581,445,409)	(12,837,270,155)
POS LUAR BIASA	D.9	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO		(12,581,445,409)	(12,837,270,155)

Banjarmasin, 25 Juli 2023
Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin,

Drs. Leonard Duma, Apt, MM.
NIP. 196510141993031001





Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	133,016,848,719	109,359,062,224
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(12,581,445,409)	(12,837,270,155)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(339,868,957)	(41,015,040)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(339,868,957)	(41,015,040)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	8,245,564,729	10,002,886,982
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(4,675,749,637)	(2,875,398,213)
EKUITAS AKHIR	E.5	128,341,099,082	106,483,664,011

Banjarmasin, 25 Juli 2023
Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin,

Drs. Leonard Duma, Apt, MM.
NIP. 196510141993031001





Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar POM di Banjarmasin

Dasar Hukum Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas
Entitas dan Obat dan Makanan sesuai:

Renstra **Pasal 33**

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

(2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 144 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

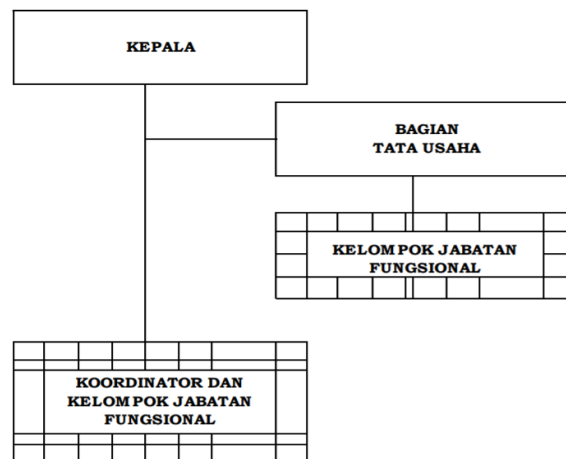
Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;



- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
 - e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
 - f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
 - g. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
 - h. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
 - i. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
 - j. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - k. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
 - l. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - m. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin



Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2019-2024



Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar POM di Banjarmasin. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Bisnis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar POM di Banjarmasin menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau



peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang Pererintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar POM di Banjarmasin dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan POM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan POM sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Pendapatan - (1) Pendapatan – LRA

LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)



- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - (2) Pendapatan – LO

LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin;
 - Pendapatan Sewa Rumah Dinas;
 - Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan memhukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Kriteria Kualitas Piutang

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
 - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
 - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
 2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses



produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar :
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
 2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
 - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya



tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.

3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 05 Akuntansi Persediaan.
- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
 - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
 - 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. dan masih dalam keadaan baik.
 - b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset Tetap
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya



berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan

Aset Tetap

- b. Penyusutan Aset Tetap
 - Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - i. Tanah
 - ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - iii. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.



- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lain-
Lain

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik



Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sementara, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta Atas Gol II., Hak Ekonomi Plaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta Atas Gol I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah



tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Capaian

A.6 Capaian output strategis

Output

Selama periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang telah dicapai oleh Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 4

Capaian Output Strategis per 30 Juni 2023



Laporan Keuangan Satker Balai Besar POM di Banjarmasin Semester I Tahun Anggaran 2023

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	160.427.000	17.319.538	10,80	14	7	50,00
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	115.714.000	47.077.950	40,68	1162	634	54,56
3	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.000.940.000	209.002.222	20,88	1	0,5	50,00
4	BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	110.222.000	16.250.000	14,74	32	21	65,63
5	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	130.000.000	7.497.000	5,77	1	0,5	50
6	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	72.211.000	70.482.000	97,61	10	10	100
7	EBA.962	Layanan Umum	292.000.000	195.540.060	66,97	1	1	25
8	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2.309.083.000	618.031.590	26,77	1	0,5	50
9	QCD.U34	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANJARMASIN	558.786.000	208.973.500	37,40	6	2	33
10	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	681.550.000	378.251.640	55,50	80	50%	50
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	759.168.000	341.390.330	44,97	25	50%	50
12	QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	170.342.000	119.531.000	70,17	8	50%	50
13	QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	167.414.000	14.890.000	8,89	971	557	57,36
14	QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	101.431.000	50.225.500	49,52	27	63,23%	63,23
15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	607.862.000	279.411.439	45,97	635	292	45,98
16	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	971.056.000	407.224.602	41,94	1601	904	56,46
17	QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	47.453.000	12.047.000	25,39	85	70	82,35
18	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	115.866.000	30.060.000	25,94	105	59	56,19
19	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	817.857.000	219.013.922	26,78	402	245	60,95
20	RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	7.615.000.000	1.387.319.841	18,22	1	0,5	50
21	EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	15.390.332.000	6.964.725.614	45,25	1	0,5	50



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.194.714.000,00. Selama semeseter 1 Tahun Anggaran 2023, telah dilakukan pemblokiran mandiri (*selfblocking*) dalam rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebesar Rp1.103.211.000 (2,91%) dan melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 9 (sembilan) kali akan tetapi tidak merubah anggaran awal dikarenakan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi DIPA tersebut sebagai berikut:

No	Revisi DIPA ke	Tgl Usulan	Tujuan Surat	Alasan / Pertimbangan
1	1	16/12/22	Plt.Sekretaris Utama	Pencadangan Anggaran untuk <i>Automatic Adjustment</i> Tahun 2023
2	2	13/02/23	Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi dan rencana kegiatan selanjutnya;
3	3	6/3/2023	Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Pemutakhiran data hasil revisi POK
4	4	15/03/23	Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Pemutakhiran data hasil revisi POK
5	5	14/04/23	Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	- Penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi dan rencana kegiatan selanjutnya - Pemutakhiran data hasil revisi POK
6	6	9/5/2023	Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Pemutakhiran data hasil revisi POK
7	7	22/05/ 2023	Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Pemutakhiran data hasil revisi POK
8	8	8/6/2023	Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Pemutakhiran data hasil revisi POK
9	9	21/06/ 2023	Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Pemutakhiran data hasil revisi POK

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut :



Tabel 5
Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023
(dalam rupiah)

Uraian	2023		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	PERUBAHAN
Pendapatan			
Pendapatan PNPB	1,000,000,000	1,000,000,000	-
Jumlah Pendapatan	1,000,000,000	1,000,000,000	-
Belanja			
Belanja Pegawai	10,240,800,000	10,240,800,000	-
Belanja Barang	14,136,703,000	14,136,703,000	-
Belanja Modal	7,817,211,000	7,817,211,000	-
Jumlah Belanja	32,194,714,000	32,194,714,000	0

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp3.353.579.558,
00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.353.579.558,00 atau mencapai 335,36 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Pendapatan Satuan Kerja Balai Besar POM di Banjarmasin terdiri dari Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023
(dalam Rupiah)

No	Akun	URAIAN	2023		
			Anggaran	Realisasi	Persentase
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		1,200,000	N/A
2	425131	pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan		2219820	N/A
3	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	1,000,000,000	429,825,000	42.98
4	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	211,123,586	N/A
5	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	341,665	N/A
6	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	2,708,869,487	N/A
Pendapatan Bersih			1,000,000,000	3,353,579,558	335.36



Realisasi Pendapatan Balai Besar POM di Banjarmasin mengalami kenaikan 479,67% dibandingkan TA 2022. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan kembali Belanja Modal TAYL.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

No	Akun	URAIAN	2023	2022	Presentase Kenaikan/Penurunan (%)
1	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	341,665	1,146,389	(70.20)
2	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	2,708,869,487	40,000,000	6,672
3	425122	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1,200,000	-	-
4	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	211,123,586	1,044,234	20,118
5	425131	Pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan	2,219,820	-	-
6	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	429,825,000	536,340,000	-
Pendapatan Bersih			3,353,579,558	578,530,623	479.67

Pendapatan Balai Besar POM di Banjarmasin berasal antara lain dari rincian pendapatan TA 2023 senilai Rp3.353.579.558,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL senilai Rp341.665,00 :
 - a) Pengembalian uang makan bulan desember 2022 senilai Rp104.850,00
 - b) Pengembalian kelebihan tukin bulan desember 2022 senilai Rp236.815,00
2. Penerimaan Kembali belanja Modal TAYL senilai Rp2.708.869.487,00 :
 - a) Penyetoran klaim bank garansi ke kas negara PT. Trio Alsum Suropati sebesar Rp85.876.097,00 berupa pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung laboratorium dan kantor pelayanan publik tahap IV tahun 2022.



- b) Penyetoran klaim bank garansi ke kas negara PT. Boriandy Putra sebesar Rp2.603.293.390,00 berupa pekerjaan kontruksi pembangunan gedung laboratorium dan kantor pelayanan publik tahap IV tahun 2022.
- c) Pembayaran kekurangan volume PT. Bumi Permata Kendari sebesar Rp20.000.000,00 berupa pekerjaan pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik Tahap III T.A 2021 .
3. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp1.200.000,00 berupa barang selain tanah dan atau bangunan rusak berat yang disetujui untuk penghapusan dengan cara lelang berdasarkan risalah lelang nomor 16/58/2023 Tgl 11 Januari 2023 sebagaimana pada Lampiran 1.
4. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah adalah sebesar Rp211.123.586,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah periode yang berakhir 30 Juni 2023

No	URAIAN	No. NTPN / SP2D	Nominal
1	Denda keterlambatan pekerjaan pemerintah pembangunan gedung BBPOM Banjarmasin Tahap IV	094EF38N3EA2DSPH1	182,553,810
2	Denda keterlambatan pekerjaan pemerintah pembangunan gedung BBPOM Banjarmasin Tahap IV	E065A8NEABOOLLH	27,383,071
3	Denda pengadaan prekursor /PPI	230451301008538	383,393
4	Denda pengadaan gas laboratorium ke- II	230451302004334	803,312
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah			211,123,586

5. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Pendapatan berupa sewa rumah dinas yang dihuni oleh Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor PL.03.01.2.25.10.22.72 Tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Tanggal 31 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 9
Pendapatan sewa tanah, Gedung dan Bangunan TA Juni 2023

No	URAIAN	No. SP2D	TANGGAL	Nominal
1	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Januari 2023	230451501000065	1 Januari 2023	369.970
2	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Februari 2023	230451501000237	1 Februari 2023	369.970
3	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Maret 2023	230451501000533	1 Maret 2023	369.970
4	Pendapatan sewa rumah dinas bulan April 2023	230451501000838	1 April 2023	369.970
5	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Mei 2023	230451501001600	1 Mei 2023	369.970
6	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juni 2023	230451501001734	1 Juni 2023	369.970
	Jumlah			2.219.820

6. Senilai Rp 429,825,000 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pendapatan dari pengujian sampel pihak ketiga baik dari kepolisian maupun dari Instansi lain.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp11.592.299.24
5,00

Realisasi Belanja instansi pada periode per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.11.592.299.245,00 atau 36% dari anggaran belanja sebesar Rp.32.194.714.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	10,240,800,000	5,026,402,846	49.08
Belanja Barang	14,136,703,000	5,102,563,061	36.09
Belanja Modal	7,817,211,000	1,465,298,841	18.74
Total Belanja Kotor	32,194,714,000	11,594,264,748	36.01
Pengembalian		1,965,503	-
Jumlah	32,194,714,000	11,592,299,245	36.01

Dibandingkan dengan per 30 Juni 2022, Realisasi Belanja per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 9 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini di karenakan kenaikan belanja modal berupa pembelian peralatan dan mesin.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022



(Dalam Rupiah)

URAIAN	Juni 2023	Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.026.262.343	4.624.454.293	(7,99)
Belanja Barang	5.100.738.061	5.276.458.589	3,45
Belanja Modal	1.465.298.841	648.028.030	(55,78)
Jumlah	11.592.299.245	10.548.940.912	(9,00)

Belanja Pegawai

Rp5.026.262.343,
00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni Tahun 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.026.262.343,00 dan Rp4.624.454.293,00. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja periode 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,69% dari periode 30 Juni 2022. Hal ini dikarenakan ada beberapa pegawai yang mengalami kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan perubahan status calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil.

Tabel 12

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan PNS	2.684.043.501	2.446.990.324	(8,83)
Belanja Uang Lembur	5.525.000	17.894.000	223,87
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus)	2.336.693.842	2.160.670.272	(7,53)
Jumlah Belanja	5.026.262.343	4.625.554.596	(7,97)



Tabel 13
Tabel rincian pengembalian belanja pegawai TA 2023
(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2023
Belanja Gaji Pokok PNS	1.968.984.420
Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.288
Belanja Tunj. Siami/Istri PNS	123.158.348
Belanja Tunj. Anak PNS	34.632.542
Belanja Tunj. Struktural PNS	26.280.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	233.435.000
Belanja Tunj. PPh PNS	14.704.946
Belanja Tunj. Beras PNS	98.708.460
Belanja Uang Makan PNS	169.677.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	14.575.000
Belanja Uang Lembur	5.525.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus)	2.336.693.842
Jumlah Belanja Kotor	5.026.402.846
Pengembalian Belanja Pegawai	140.503
Jumlah Belanja	5.026.262.343

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang yang berakhir periode 30 Juni Tahun 2023 dan Rp5,100,738,061, 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5,100,738,061,00 dan 00 Rp5,276,458,589,00. Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,30 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2022. Penurunan Belanja Barang karena penurunan belanja barang persediaan.

Tabel 14
Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.010.184.084	1.106.998.929	9,58
Belanja Barang Non Operasional	550.966.167	407.543.576	(26,03)
Belanja Jasa	675.026.032	779.035.332	15,41
Belanja Pemeliharaan	502.914.773	465.604.918	(7,42)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.373.079.978	1.013.713.179	(26,17)
Belanja Barang Persediaan	988.567.027	1.503.562.655	52,10
Jumlah Belanja	5.100.738.061	5.276.458.589	3,45



B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp1.465.298.841,
00

Realisasi Belanja Modal periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.465.298.841,00 dan Rp648.028.030,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset berupa peralatan dan mesin serta Gedung dan bangunan.

Realisasi Belanja modal Per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 126,12% dibanding Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,465,298,841	243,000,060	-83.42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	405,027,970	#DIV/0!
Jumlah Belanja	1,465,298,841	648,028,030	-55.78

Belanja Modal
Tanah
Rp1.465.298.841,
00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.465.298.841,00 Mengalami kenaikan sebesar 503 persen bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,465,298,841	243,000,060	503.00
Belanja Refreshment Alat Laboratorium		2,280,000	
Belanja Penambah Nilai Peralatan dan Mesin		240,720,060	
Jumlah Belanja Kotor	1,465,298,841	243,000,060	503.00
Jumlah Belanja	1,465,298,841	243,000,060	503.00

Transaksi pembelian belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:



No	Nama Barang	Kuantitas	Nomor SP2D	Tgl	Nominal
1	Printer All In One	2	23045130200 4786	12 Juni 2023	Rp 5.050.000,00
2	Filling Cabinet	3	23045130101 1589	12 Juni 2023	Rp 7.497.000,00
3	Alat Laboratorium Dusa For MDI + DPI	1	23045130500 1481	23 Juni 2023	Rp 1.387.319.841,00
4	Logitech webcam C930e	1	23045130200 5254	23 Juni 2023	Rp 1.860.000,00
	WorkForce WF - 100 Wifi Inject Printer	1			Rp 5.174.000,00
	Mybook pro H5 (8S5)	4			Rp 46.760.000,00
	EchoTank L5290A4Wifi all in one ink tank printer with ADF	2			Rp 11.638.000,00
Jumlah					Rp 1.465.298.841,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp228.900.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp228.900.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca, dengan Saldo UP sebesar Rp219.812.294,00 dan Kuitansi UP sebesar Rp9.087.706,00. Selisih Rp86,00 di Tunai karena tidak ada uang kecil dari bank. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

Keterangan	30-Jun-23	31-Dec-22
Saldo UP	219,812,294	-
- Kas Bank (No. Rek 8100124328811000 Bank Ma	259,831,926	-
- Tunai	8,929,100	-
- Uang Muka	19,642,294	-
- LS Bendahara	(68,590,940)	-
- Pembulatan	(86)	-
Kuitansi UP	9,087,706	-
Jumlah	228,900,000	-



Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp68.590.940,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp68.590.940,00 dan Rp.0,00 Kas Lainnya dan Setara Kas adalah LS Bendahara yang ada di rekening bank Bendahara Pengeluaran yang belum di cairkan sampai akhir bulan juni 2023. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan sebagai berikut :

Tabel 18
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Jenis	30-Jun-23	31-Dec-22
Kas Lainnya dan Setara Kas	68,590,940	-
Saldo Akhir	68,590,940	-

Piutang Bukan
Pajak
Rp369.970,00

C.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp369.970,00 dan Rp0,00 merupakan pendapatan sewa rumah dinas pimpinan yang dipotong melalui Gaji Induk Bulan Juli 2023 dengan nomor SPM 00334 Tgl 8 Juni 2023, SP2D No 230451501002279 Tgl 1 Juli 2023

Persediaan
Rp2.233.957.669,
00

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.233.957.669,00 dan Rp2.283.075.729,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Persediaan Per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

Persediaan	30-Jun-23	31-Dec-22
Barang Konsumsi	125.097.734	46.547.772
Bahan untuk Pemeliharaan	51.838.356	55.566.276
Suku Cadang	794.514.853	881.212.929
Bahan Baku	1.262.506.726	1.299.748.752
JUMLAH	2.233.957.669	2.283.075.729



Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp11.620.350,00 berada dalam kondisi rusak/usang dan tidak disajikan dalam Persediaan. Telah dilakukan stock opname per 30 Juni 2023 sesuai Berita Acara Stock Opname Nomor PL.03.01.22A.22A5.07.23.377 tanggal 30 Juni 2023 sebagaimana dalam lampiran 2.

Tanah

Rp32.052.868.000
,00

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.052.868.000,00 dan Rp32.052.868.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah atau mutasi kurang. Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 20
Mutasi Nilai Tanah Per 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Des 2022	32,052,868,000
Mutasi Tambah :	-
Pembelian	0
Mutasi Kurang :	0
Revaluasi Aset	0
Saldo Per 30 Juni 2023	32,052,868,000
Akumusi Penyusutan sd 30 jun 23	
Nilai Buku Per 30 Juni 23	32,052,868,000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 21
Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2023
(dalam Rupiah)

KIB	Uraian	Luas	Lokasi	Status Sertifikasi BMN	Jenis Sertifikasi	Pemegang Hak	No Sertifikat	Nilai
1	Tanah bangunan rumah negara golongan 1	1001 m2	Jalan Brigjend H.Hasan Basri No.1 Banjarmasin	Bersertifikat	SHP	Bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas obat Dan Makanan Republik	SHP No 17.01.04.05 .4.000.20	10,550,088,000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1852 m2	Jalan Brigjend H.Hasan Basri No.40 Banjarmasin	Bersertifikat	SHP	nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas obat Dan Makanan	SHP No 17.01.04.05 .4.000.21	21,351,220,000
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7476 m2	Jalan Bina Praja Utama Kelurahan/Kecamatan Cempaka Kotamadya Banjarbaru	Bersertifikat	SHP	Bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas obat Dan Makanan Republik	SHP No 17.11.73.01 .2.00.156	151,560,000
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2523 m2	Jalan Bina Praja Utama Kelurahan/Kecamatan Cempaka Kotamadya Banjarbaru	Bersertifikat	SHP	Bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas obat Dan Makanan Republik Indonesia	SHP No 17.11.73.01 .2.00.148	

Peralatan dan Mesin

Rp62.152.793.858,00

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp62.152.793.858,00 dan Rp60.687.185.017,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 22
Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2023
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	60,687,185,017
Mutasi tambah:	1,465,608,841
Penggunaan kembali alat Ultrasonik	310,000
Pembelian	1,465,298,841
Mutasi Kurang	-
Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas	-
Saldo per 30 Juni 2023	62,152,793,858
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(45,313,420,788)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	16,839,373,070

Penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar



Rp1.465.608.841,00 terdiri dari transaksi berupa:

a. Pembelian terdiri dari :

No	Nama Barang	Kuantitas	Nomor SP2D	Tgl	Nominal
1	Printer All In One	2	23045130200 4786	12 Juni 2023	Rp 5.050.000,00
2	Filling Cabinet	3	23045130101 1589	12 Juni 2023	Rp 7.497.000,00
3	Alat Laboratorium Dusa For MDI + DPI	1	23045130500 1481	23 Juni 2023	Rp 1.387.319.841,00
4	Logitech webcam C930e	1	23045130200 5254	23 Juni 2023	Rp 1.860.000,00
	WorkForce WF - 100 Wifi Inject Printer	1			Rp 5.174.000,00
	Mybook pro H5 (8S5)	4			Rp 46.760.000,00
	EchoTank L5290A4Wifi all in one ink tank printer with ADF	2			Rp 11.638.000,00
Jumlah					Rp 1.465.298.841,00

b. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang) 1 unit Rp310.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PL.03.01.22A.22A5.06.23.73 tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana lampiran 3.

Rincian aset tetap peralatan dan mesin dan Akumulasi penyusutan per 30 Juni 2023 disajikan pada lampiran 4 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan

Bangunan

Rp6.578.343.000,
00

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp6.578.343.000,00 dan Rp6.578.343.000,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 23
Mutasi Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023
(Dalam Rupiah)



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	6,578,343,000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang	
Saldo per 30 Juni 2023	6,578,343,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(2,409,666,250)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	4,168,676,750

Rincian Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran 5 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp1.798.991.225,00

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.798.991.225,00 dan Rp1.798.991.225,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 24
Mutasi Jaringan dan Irigasi Per 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1,798,991,225
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2023	1,798,991,225
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(205,662,424)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	1,593,328,801

Aset berupa :

- Bangunan Air Irigasi dengan nilai Rp. 11.761.000
- Jaringan Listrik dengan nilai 1.787.230.225

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran 6 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp175.578.783,00

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp175.578.783,00 dan Rp175.578.783,00.

Tabel 25
Mutasi Aset Tetap lainnya Per 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	175,578,783
Mutasi tambah:	-
Penambahan	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2023	175,578,783
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	
Nilai Buku per 30 Juni 2023	175,578,783

Rincian aset tetap lainnya dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023 disajikan pada Lampiran 7 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp71.825.456.223,00

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp71.825.456.223,00 dan Rp68.696.802.836,00.

Tabel 26
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 30 Juni 2023
(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan KDP per 31 Desember 2022	68,696,802,836
Mutasi tambah KDP:	3,437,820,836
Pengembangan KDP	3,437,820,836
Total KDP	72,134,623,672
Mutasi kurang:	309,167,449
Koreksi Nilai	-
Total Mutasi Kurang	309,167,449
Nilai Buku per 30 Juni 2023	71,825,456,223

Pengembangan KDP gedung dan Bangunan senilai 3.437.820.836,00 merupakan nilai sisa pekerjaan yang dijamin dan diperhitungkan sebagai prestasi pekerjaan sesuai surat nomor PL.02.03.22A.22A5.02.23.29 tanggal 31 Januari 2023 dan surat nomor PL.02.03.22A.22A5.01.23.30 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana lampiran 8.

Koreksi nilai KDP gedung dan bangunan berkurang senilai Rp309.167.449,00 merupakan kekurangan volume pekerjaan berdasarkan Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 09b./LHP/XIX/05/2023 tanggal 24 Mei 2023.

C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Desember 2022 adalah masing – masing sebesar Rp 47.928.749.462,00 dan Rp 45.348.880.015,00 .
Rp47.928.749.462,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) . Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023.

Tabel 27

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	62,152,793,858	45,313,420,788	16,839,373,070
2	Gedung dan Bangunan	6,578,343,000	2,409,666,250	4,168,676,750
3	Jalan , Irigasi , dan Jaringan	1,798,991,225	205,662,424	1,593,328,801
4	Aset Tetap Lainnya	175,578,783		175,578,783
	JUMLAH	70,705,706,866	47,928,749,462	22,776,957,404

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp497.280.118,00

C.13 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp497.280.118,00 dan Rp64.507.687,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Utang Kepada Pihak Ketiga	Jumlah
LS Bendahara	68.590.940
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	314.739.178
SPM 00334T Gaji Induk Juli 2023	314.739.178
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	113.950.000
SPM 00397T Gaji PPNPN Bulan Juli	113.950.000



Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp118.821.006,00

C.14 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp118.821.006,00 dan Rp0,00. Utang yang belum ditagihkan merupakan BAST LS Non Kontraktual yang belum dibayarkan.

Uang Muka dari
KPPN
Rp228.900,00

C.15 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp228.900,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp128.341.099.08
2,00

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp128.341.099.082,00 dan Rp133.016.848.719,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp643.538.376,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp643.538.376 dan Rp537.384.234. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 28

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	211,123,586	1,044,234	20118.03
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	429,825,000	536,340,000	-19.86
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan Bangunan	2,589,790	-	N/A
Jumlah	643,538,376	537,384,234	19.75



- a. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah adalah sebesar Rp211.123.586,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah periode yang berakhir 30 Juni 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	No. NTPN / SP2D	Nominal
1	Denda keterlambatan pekerjaan pemerintah pembangunan gedung BBPOM Banjarmasin Tahap IV	094EF38N3EA2DSPH1	182,553,810
2	Denda keterlambatan pekerjaan pemerintah pembangunan gedung BBPOM Banjarmasin Tahap IV	E065A8NEABOOLLH	27,383,071
3	Denda pengadaan prekursor /PPI	230451301008538	383,393
4	Denda pengadaan gas laboratorium ke- II	230451302004334	803,312
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah			211,123,586

- b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Pendapatan berupa sewa rumah dinas yang dihuni oleh Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor PL.03.01.2.25.10.22.72 Tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Tanggal 31 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Pendapatan sewa tanah, Gedung dan Bangunan TA Juni 2023

No	URAIAN	No. SP2D	TANGGAL	Nominal
1	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Januari 2023	230451501000065	1 Januari 2023	369.970
2	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Februari 2023	230451501000237	1 Februari 2023	369.970
3	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Maret 2023	230451501000533	1 Maret 2023	369.970
4	Pendapatan sewa rumah dinas bulan April 2023	230451501000838	1 April 2023	369.970
5	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Mei 2023	230451501001600	1 Mei 2023	369.970
6	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juni 2023	230451501001734	1 Juni 2023	369.970
7	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juli 2023	230451501002279	1 Juli 2023	369.970
Jumlah				2.589.790



D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp5.341.001.521,00

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.341.001.521,00 dan Rp5.435.529.770,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Untuk Beban Pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin hanya mencakup gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 31

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2,216,351,372	2,269,592,972	-2.35
Beban Tunjangan - Tunjangan	782,431,307	808,095,683	-3.18
Beban Honorarium dan Vakasi	2,342,218,842	2,357,841,115	-0.66
Jumlah	5,341,001,521	5,435,529,770	-1.74

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp960.558.804,00

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp960.558.804,00 dan Rp933.856.985,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	151,915,293	133,796,553	13.54
Beban Persediaan Bahan Baku	808,643,511	800,060,432	1.07
Jumlah Beban Persediaan	960,558,804	933,856,985	2.86



Beban Barang dan
Jasa
Rp2.285.954.902,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.285.954.902,00 dan Rp. 2.403.903.514,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Behan Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban langganan listrik, beban jasa profesi, beban honor dan beban bahan seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan diklat. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami kenaikan tetapi pada beberapa pos beban terjadi penurunan karena penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	971,252,390	930,371,219	4.39
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		146,231,540	(100.00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	77,088,000	48,378,500	59.34
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,245,000	6,166,850	(31.16)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	71,800,000	98,726,000	(27.27)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	77,138,760	26,000,000	196.69
Beban Bahan	451,662,407	356,907,276	26.55
Beban Honor Output Kegiatan	22,250,000	68,150,000	(67.35)
Beban Langganan Listrik	261,364,482	179,450,299	45.65
Beban Langganan Telapon	8,900,234	29,688,225	(70.02)
Beban Langganan Air	20,143,569	8,816,205	128.48
Beban Sewa	45,982,000	25,400,000	81.03
Beban Jasa Profesi	35,505,000	29,400,000	20.77
Beban Jasa Lainnya	238,623,060	439,298,400	(45.68)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		8,899,000	(100.00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin		1,520,000	(100.00)
Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel		500,000	(100.00)
JUMLAH	2,285,954,902	2,403,903,514	(4.91)



D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp693.020.448,00

Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp693.020.448,00 dan Rp 1.008.316.669,00.. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23,045,300	25,424,950	-9.36
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	304,077,827	250,935,612	21.18
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	47,804,920	36,453,786	31.14
Beban Persediaan Suku Cadang	318,092,401	480,117,301	-33.75
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		215,385,020	0.00
Jumlah	693,020,448	1,008,316,669	-31.27

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.374.809.978,00

Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.374.809.978,00 dan Rp 1.117.999.469,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	791,849,202	654,151,997	21.05
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,400,000	44,400,000	20.27
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,585,000	117,600,000	-43.38
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	462,975,776	301,847,472	53.38
Jumlah	1,374,809,978	1,117,999,469	22.97



Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.579.559.447,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.579.559.447,00 dan Rp2.512.970.580,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,357,210,843	2,290,621,976	2.91
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	199,805,451	199,805,451	0.00
Beban Penyusutan Irigasi	202,776	202,776	0.00
Beban Penyusutan2 aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	23,163,796		
Beban Penyusutan Jaringan	22,340,377	22,340,377	0.00
Jumlah Penyusutan	2,602,723,243	2,512,970,580	3.57
Beban Amortisasi Aset Lainnya	-	-	
Jumlah Amortisasi	-	-	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,602,723,243	2,512,970,580	3.57



Kegiatan Non
Operasional
Rp9.921.315

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 37
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

URAIAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,200,000		-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		3,223,791	-
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	1,200,000	(3,223,791)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20,341,665	41,151,389	(50.57)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,620,350	5,000	232,307.00
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,721,315	41,146,389	(78.80)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	9,921,315	37,922,598	(73.84)

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk semester I Tahun 2023 dan 2022.



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp133.016.848.7
19,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.133.016.848.719,00 dan Rp.109.359.062.224,00.

Defisit LO
(Rp12.581445.40
9,00)

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.(12.581.445.409) dan Rp. (12.837.270.155,00). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah atau Mengurang Ekuitas

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp.0,00

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan reklas masuk dan keluar persediaan, dimana terdapat 2 kodefikasi dengan jenis yang sama dan sudah memiliki kuantitas serta reklas masuk dan keluar aset tetap.

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp.339.868.957

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.(339.868.957),00 dan Rp(41.015.040,00).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 38

Koreksi Rincian Aset Non Revaluasi TA 2023

(dalam rupiah)

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	30,701,508
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	309,167,449
Jumlah	339,868,957



E.4 Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar Entitas
Rp8.245.564.729,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8245.564.729,00 dan Rp 10.002.886.982,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 39
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023
(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	11,592,299,245
Diterima dari Entitas Lain	(3,353,579,558)
Transfer Masuk	13,816,430
Transfer Keluar	(6,971,388)
Jumlah	8,245,564,729

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/ Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

DKEL
Rp11.592.299.245,00
DDEL
Rp(3.353.579.558,00)

Ditagihkan ke Entitas Lain/ Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DKEL sebesar Rp11.592.299.245,00 sedangkan DDEL sebesar Rp(3.353.579.558,00).

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk
Rp13.816.430,00

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp13.816.430,00 terdiri dari :

Terdapat barang transfer masuk dari P3OMN, terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	BAST	Nilai
1	Baku Bakteri	P3OMN	T-PP.05.02.10.104.02.23.069A	1,623,710
2	Baku Pembanding	P3OMN	T-PP.03.02.10.105.05.23.185A	12,192,720
Jumlah				13,816,430

Transfer Keluar
Rp6.971.388,00

Transfer Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp6.971.388,00 terdiri dari :



Terdapat barang transfer keluar ke BBPOM di Palangkaraya, terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	BAST	Nilai
1	Reagensia	BBPOM Palangkaraya	PL.03.03.22A.22A5.03.23.293	Rp 5,660,188
2		BBPOM Palangkaraya	PL.03.03.22A.22A5.03.23.294	Rp 1,311,200
Jumlah				6,971,388

Ekuitas Akhir

Rp128.341.099.082

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing – masing adalah sebesar Rp128.341.099.082 dan Rp106.483.664.011.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

A. Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Balai Besar POM di Banjarmasin no. HK.02.02.22A.22A5.01.23.01 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Balai Besar POM di Banjarmasin dan telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Leonard Duma, Apt.,M.M
2. Pejabat Pembuat Komitmen 1 : Halida Endraswati, SF., Apt
3. Pejabat Pembuat Komitmen 2 : Yuyun Purwaningsih, S.Farm, Apt
4. Pejabat Penandatangan SPM : Mokhamad Hartono Edi, S.Si
5. Bendahara : Sandy Alam Dwi Saputra, S.Ak

A. Rekening Virtual Pengeluaran

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin No 000020 Tgl 8 Oktober 2020 perihal persetujuan pembukaan rekening satker lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan, memberikan persetujuan untuk memberikan rekening Virtual Account dengan nama rekening BPG 045 BALAI POM BANJARMASIN dengan nomor rekening 8100124328811000.



B. Barang Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses penyidikan di bidang Obat dan Makanan (penindakan). Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindak pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi.

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barang sitaan/ bukti dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang masih berada di gudang barang bukti Balai Besar POM di Banjarmasin per 30 Juni 2023 sebagai berikut :

Tahap Perkara	Obat	OT	SK	Pangan	Kemas an	Kos	Mesin / Alat Produks i	Lain- lain
Proses SPDP / SPDP								
Tahap 1	11,405	6,148						
P-18 / P19								
P-21		7,248						
Tahap 2								
Proses Persidangan	59,026	10,890						
SP 3	9,900	42				3,418	7	
Jumlah	80,331	24,328				3,418	7	

Per tanggal 30 Juni 2023 untuk barang bukti masih berada di Gudang Barang Bukti Bagian Penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin adalah Obat sebanyak 11.405 Pcs dan Obat Tradisional 6.148 Pcs

C. ALAT GELAS KUALITATIF

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/ atau alat gelas yang berada di laboratorium namun belum digunakan sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas



kualitatif dengan kondisi baik pada lingkungan Badan POM per 30 Juni 2023 adalah sejumlah 12225 unit, dengan rincian sebagaimana dalam lampiran 9.

D. BMN Tidak Ditemukan

Masih terdapat hasil inventarisasi aset peralatan dan mesin yang tidak ditemukan yang belum selesai ditindaklanjuti pada BBPOM di Banjarmasin terdapat 17 barang yang belum ditemukan, atas hal tersebut terdapat surat Inspektur Utama perihal Reviu APIP terhadap inventarisasi barang yang tidak ditemukan pada BBPOM Banjarmasin. Sampai dengan saat ini BBPOM Banjarmasin masih dalam proses menindaklanjuti atas rekomendasi APIP yaitu:.

1. Penyampaian tindak lanjut rekomendasi reviu APIP terhadap Inventarisasi Barang Tidak ditemukan berupa Penyelesaian Kerugian Negara terhadap 10 unit barang kepada Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PL.03.02.22A.22A5.12.22.992 tanggal 22 Desember 2022 dan bersurat ke Inspektur Utama Badan POM No.B.PL.03.02.22A.22A5.04.23.292 tanggal 10 April 2023 (Tim TGR).
2. Mengajukan surat permohonan persetujuan penghapusan BMN tidak ditemukan (penghapusan dengan sebab-sebab lain) terhadap 7 barang dengan surat permohonan nomor B-PL.03.09.22A.22A5.12.1044 tanggal 31 Desember 2022 dengan nilai perolehan sebesar Rp22.308.000,00. Permohonan persetujuan penghapusan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Utama surat nomor B-PL.03.09.2.25.03.23.198 tanggal 9 Maret 2023.

Penghapusan barang tidak ditemukan dengan sebab-sebab lain berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin selaku Kuasa Pengguna Barang nomor HK.02.02.22A.22A5.04.23.120 tanggal 10 April 2023 sebagaimana dalam lampiran 10.

E. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian/Lembaga Badan Pengawas Obat



dan Makanan Satuan Kerja Balai Besar POM di Banjarmasin terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional III-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 11 (sebelas) kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 (satu) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp14.654.023.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.001.254.864 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian output strategis	%
Balai Besar POM di Banjarmasin	Program Pengawasan Obat dan Makanan							
	QCD.U34 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANJARMASIN	558,786,000	208,973,500	37,40	Perkara, Berkas Perkara	6	2	33
	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	681,550,000	378,251,640	55,50	Lembaga	80	50%	50
	QDB.002 Desa Pangan Aman	759,168,000	341,390,330	44,97	Lembaga	25	50%	50
	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	170,342,000	119,531,000	70,17	Lembaga	8	50%	50
	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	607,862,000	279,411,439	45,97	Produk	635	292	45,98
	QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	971,056,000	407,224,602	41,94	Produk	1601	904	56,46
	QIA.008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	47,453,000	12,047,000	25,39	Produk	85	70	82,35
	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	115,866,000	30,060,000	25,94	Lembaga	105	59	56,19
	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	817,857,000	219,013,922	26,78	Lembaga	402	245	60,95
	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	7,615,000,000	1,387,319,841	18,22	Paket	1	0,5	50
	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2,309,083,000	618,031,590	26,77	Lembaga	1	0,5	50
	JUMLAH	14,654,023,000	4,001,254,864	27,3				



VI. DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

1. Daftar Tabel

No Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1	Kriteria Kualitas Piutang	12
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	17
Tabel 4	Capaian Output Strategis per 30 Juni 2023	18
Tabel 5	Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023	20
Tabel 6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023	20
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022	21
Tabel 8	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah periode yang berakhir 30 Juni 2023	22
Tabel 9	Pendapatan sewa tanah, Gedung dan Bangunan TA Juni 2023	23
Tabel 10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023	23
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022	24
Tabel 12	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022	24
Tabel 13	Tabel rincian pengembalian belanja pegawai TA 2023	25
Tabel 14	Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022	25
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022	26
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022	26
Tabel 17	Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022	27
Tabel 18	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022	27
Tabel 19	Rincian Persediaan Per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022	27
Tabel 20	Mutasi Nilai Tanah Per 30 Juni 2023	29
Tabel 21	Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2023	29
Tabel 22	Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2023	30
Tabel 23	Mutasi Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023	31
Tabel 24	Mutasi Jaringan dan Irigasi Per 30 Juni 2023	31
Tabel 25	Mutasi Aset Tetap lainnya Per 30 Juni 2023	32
Tabel 26	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 30 Juni 2023	32
Tabel 27	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023	33
Tabel 28	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022	35
Tabel 29	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah periode yang berakhir 30 Juni 2023	35
Tabel 30	Pendapatan sewa tanah, Gedung dan Bangunan TA Juni 2023	36
Tabel 31	Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2022	36
Tabel 32	Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022	37
Tabel 33	Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022	38
Tabel 34	Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 30 Juni 2022	38
Tabel 35	Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 30 Juni 2022	39
Tabel 36	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022	40
Tabel 37	Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022	40
Tabel 38	Koreksi Rincian Aset Non Revaluasi TA 2023	41
Tabel 39	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023	42



2. Daftar Lampiran

Lampiran 1	Risalah Lelang
Lampiran 2	Berita Acara Stock Opname 30 Juni 2023
Lampiran 3	Surat Keterangan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan
Lampiran 4	Rincian aset tetap peralatan dan mesin dan Akumulasi penyusutan per 30 Juni 2023
Lampiran 5	Rincian Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023
Lampiran 6	Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023
Lampiran 7	Rincian aset tetap lainnya dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2023
Lampiran 8	Surat Penetapan Nilai Pengembalian kepada Negara PT Boriandy Putra dan PT. Trio Alsum Suropati
Lampiran 9	Daftar Alat Gelas Kualitatif
Lampiran 10	Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Tentang Penghapusan BMN dengan Sebab-sebab lain